



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021-2026

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Jl. Terpadu, Selatpanjang  
Telp. (0763) 8001555 / Fax. (0763) 8001555  
Website : [dinsos.merantikab.go.id](http://dinsos.merantikab.go.id)



**bkkbn**



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan arah kebijakan, prioritas pembangunan, program prioritas dan pagu indikatif maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026, perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021-2026.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 64), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing perangkat daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023  
NOMOR 53

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun ini dengan baik.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan yaitu 2021-2026 dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, 5 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kepulauan Meranti



**SUKRI SE**

**Pembina / (IV.a)**

**NIP. 19800401 200012 1 001**

## DAFTAR ISI

Cover	
Perbub Renstra 2021-2026	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN DINSOS PPPA PPKB</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	31
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINSOS PPPA PPKB</b>	<b>33</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026.....	35
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi Riau.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
<b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>51</b>
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA PPKB.....	51
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA PPKB .....	51

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	55
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	65
BAB VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	91
BAB VIII	PENUTUP.....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	21
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon .....	22
Tabel 1.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinsos PPPA PPKB	23
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA P2KB Kabupaten Kepulauan Meranti (Renstra Periode Lalu) .....	25
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA P2KB Kabupaten Meranti (Renstra Periode Lalu) .....	29
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	33
Tabel 3.2	Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2021-2026.....	37
Tabel 3.3	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Kementerian Sosial .....	39
Tabel 3.4	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Kementrian PPPA .....	42
Tabel 3.5	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra BKKBN.....	45
Tabel 3.6	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau.....	47
Tabel 3.7	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Dinas PPPA PPKB Provinsi Riau .....	49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB Tahun 2021-2026 .....	52
Tabel 5.1	Analisis SWOT berdasarkan isu – isu strategis daerah .....	55
Tabel 5.2	Penentuan Alternatif Strategi.....	56
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.....	59
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.....	65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas SOSIALPPPAPPKB.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) merupakan salah satu dari 26 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki tiga urusan dan 15 sub urusan. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang berpulau-pulau, yang telah melaksanakan pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Konsekuensi dari hasil pilkada, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas PPPAPPKB dengan RPJMD, Renstra Kementerian PPPA, Renstra BKKBN, Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau serta dengan Renja diuraikan sebagai berikut:

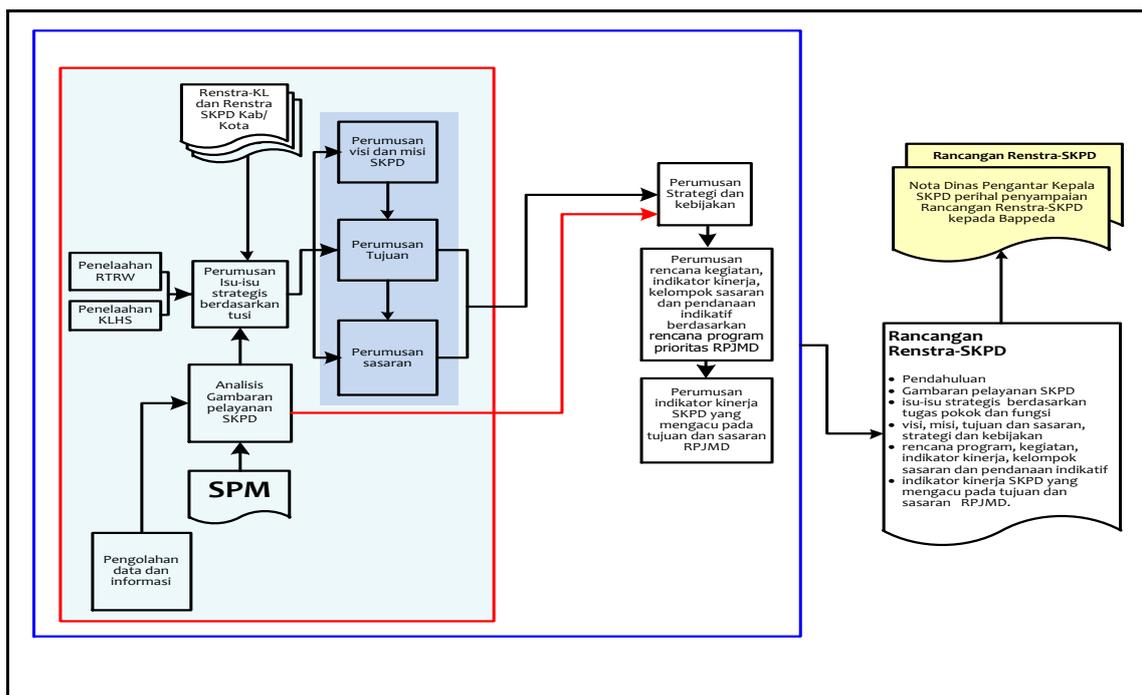
1. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Peraturan Bupati (PERBUP)

Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti, RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Renstra BKKBN, Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Renstra Perubahan ini disusun dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 serta Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas SOSIALP3AP2KB**  
**Kabupaten Kepulauan Meranti**



Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangn 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5); dan
  23. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 23);
  24. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung Visi dan Misi Bupati;
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DinsosPPPAPPKB ) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti, telaahan Renstra Kementerian PPPA, , Kementrian Sosial dan BKKBN, telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Bab V Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan.**

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINSOS PPPA PPKB**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

**2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, umum, kepegawaian, perencanaan dan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan dan perlengkapan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- 1) Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja ;
- 2) Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan ;
- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi bagian umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan ;
- 4) Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;
- 5) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Sosial

Bidang Sosial dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial.

Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai pokok menyelenggarakan urusan pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

- 3) Penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan pertahun anggaran tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 4) penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pertahun anggaran tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 5) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 6) Penyelenggaraan penyusunan data gender di semua bidang pembangunan;
- 7) Penyelenggaraan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 8) Melaksanakan penyiapan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 9) Penyelenggaraan penatalaksanaan administrasi, dokumen tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 10) Menyusun Pedoman teknis dan pelaksanaan Program pemenuhan Hak Anak;
- 11) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi partisipasi pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 12) Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

- 13) Melaksanakan fasilitasi terkait dengan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan anak, partisipasi anak, dan perlindungan anak;
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan hak anak; dan
- 15) Menyelenggaraan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (nspk) dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten/kota;

- 11) Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota;
- 12) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di kabupaten /kota;
- 13) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- 14) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- 15) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- 16) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 17) Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 18) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita;
- 19) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R);
- 20) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia;
- 21) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- 22) Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 23) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- 24) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

f. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan terdiri dari:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis , pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

- 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- 4) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang bergubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- 5) Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- 6) Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup satuan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- 7) Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan dinas;
- 8) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- 9) Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- 10) Melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- 11) Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- 12) Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- 13) Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- 14) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan aset;

- 15) Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- 16) Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- 17) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian dan perlengkapan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat.

g. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari:

- 1) Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program;
- 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- 4) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program serta menyiapkan bahan0bahan dalam rangka pemecahan masalah;

- 5) Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran;
- 6) Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran;
- 7) Melakukan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan program;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan dinas;
- 9) Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;
- 11) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- 12) Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
- 13) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
- 14) Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- 15) Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
- 16) Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) guna menampung usulan program pembangunan yang

mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;

- 17) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan;
- 18) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- 1) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

### 2.1.2 Struktur Organisasi

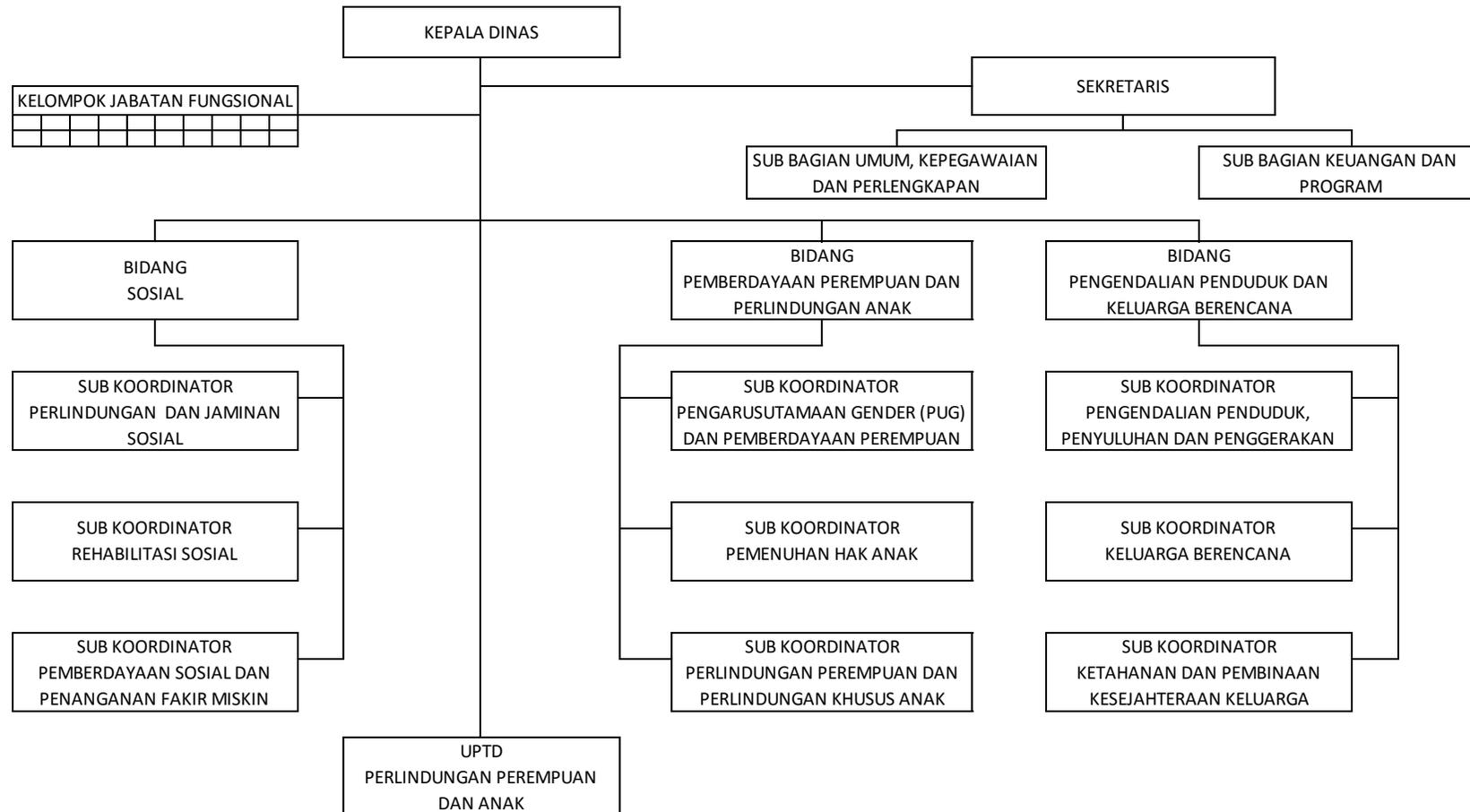
Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan Dan Program.
- c) Bidang Sosial, terdiri dari:
  1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan dan jaminan Sosial;

2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial;
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- d) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
  2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemenuhan Hak Anak;
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- e) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keluarga Berencana;
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketahanan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- f) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas sosial PPPA PPKB adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi



Sumber : Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun Sumber daya Manusia yang di miliki Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti adalah berjumlah 71 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 20 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 51 Orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, Golongan serta Eselon dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**pada Dinsos PPPAPPKB Kabupaten Kepulauan Meranti**  
**Tahun 2023**

No.	Tingkat Pendidikan	PNS			Honorer		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	SD	-	-	-	2	1	3
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	1	1	6	7	13
4	D II	-	-	-	1	-	1
5	D III	1	3	4	4	3	7
6	S 1	8	4	12	8	19	27
7	S 2	1	1	2	-	-	-
8	S 3	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>51</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan*

Selanjutnya dilihat berdasarkan Golongan, Jumlah PNS yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Pada Dinsos PPPAPPKB Kabupaten Kepulauan Meranti**  
**Tahun 2023**

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan II	-	-	-
2	Golongan III	9	7	16
3	Golongan IV	3	1	4

*Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan*

Adapun jumlah pejabat Eselon II, III, dan IV pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon**  
**Pada DinsosPPPAPPKB Kabupaten Kepulauan Meranti**  
**Tahun 2023**

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	2	-	2

*Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan*

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.
5. Peningkatan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Memperhatikan tabel diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja ASN. Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta goodwill dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan.

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana merupakan hal yang sangat urgen menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti. Sarana prasarana memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja organisasi serta kinerja aparatur. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sarana prasarana sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinsos PPPA PPKB**  
**Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Utama	1		1
2	Gedung Aula	1		1
3	Pertemuan	1		1
5	Gedung Asrama Pelajar KAT	1		1
6	TMP	1		1
7	Gedung TAGANA	1		1
8	Gedung UPPKH	1		1
9	Mushola	1		1
10	Mobil Avanza	1		1
11	Mobil Pick Up		1	1
12	Mobil Rescue Tagana	1		1
14	Kendaraan Bermotor Roda 2	20	5	25
15	Kamera	1	3	4
16	Speedboat TAGANA		1	1
17	Komputer	27	14	41
18	Laptop	7	5	12
19	Printer	16	44	60
20	Proyektor	9	4	13
21	Mesin Fotocopy		1	1
22	AC	16	16	32
23	Kipas Angin	11	29	40
24	Sound system	2	4	6
25	Gedung BLK	1		1
26	Gedung Alokon	1		1
27	Balai BPKB	9		9
29	Dispenser	2	3	5
30	Mesin Air	2	1	3
31	Mesin Potong Rumput	3	3	6
32	Mesin Genset	2		2

33	Meja rapat	2	3	5
34	Meja ½ biro	46	57	103
35	Kursi putar	34	19	53
36	Sofa	3	7	10
37	Kursi aula	57		57
38	Lemari arsip	11		11
39	Lemari besi	13	1	14

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan sarana prasarana untuk Tahun 2021-2026 yang harus dipenuhi yaitu :

1. Sepeda Motor sebanyak 10 (sepuluh) Unit
2. Komputer Desktop sebanyak 20 (duapuluh) Unit
3. Laptop sebanyak 15 (lima belas) Unit
4. Printer sebanyak 20 (duapuluh) Unit
5. Printer Laser sebanyak 10 (sepuluh) Unit
6. Meja Rapat sebanyak 2 (dua) Unit
7. Meja Kursi kerja ½ biro sebanyak 15 (lima belas) Set
8. Lemari arsip sebanyak 20 (dua puluh) Unit
9. AC 1 PK sebanyak 10 (sepuluh) Unit
10. AC 2 PK sebanyak 5 (lima) Unit
11. Mesin Fotocopy sebanyak 1 (satu) Unit
12. Mesin Babat rumput sebanyak 2 (dua) Unit
13. Mesin Genset 60 kva sebanyak 1 (satu) Unit
14. Camera Mirrorless dan DSLR 2 (dua) Unit
15. Gimbal Kamera Mirrorless dan DSRL 2 (dua) Unit
16. Sofa 1 (satu) Set
17. Brangkas 1 (satu) Unit
18. Hardisk external SSD 5 (lima) Unit
19. Hardisk Camera external 10 buah
20. Proyektor 4K Laser 5 ( lima ) Unit

Pertimbangan kebutuhan sarana prasarana itu karena barang-barang tersebut sudah waktunya harus diganti, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA P2KB Kabupaten Kepulauan Meranti  
(Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				70	80	85	90	90	75	81	124,2	73,38	85	107%	101%	146%	82%	94%
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				15	16	17	18	19	8,3	4,6	4,1	5,2	7,7	55%	29%	24%	29%	41%
3	Persentase PMKS yang Tertangani				50	55	60	65	70	60	60	39,92	61,35	77	120%	109%	67%	94%	110%
4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				10	12	14	16	18	8,3	4,6	4,1	5,20	7,7	83%	38%	29%	33%	43%
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial				n/a	50	52	54	56	n/a	13,71	13	39	39	n/a	27%	25%	72%	70%
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				10	12	14	16	18	8,1	10,16	10,82	10,82	9,89	81%	85%	77%	68%	55%
8	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR				20	22	24	26	28	16,67	16,67	13,33	13,33	13,33	83%	76%	56%	51%	48%
9	Partisipasi perempuan di lembaga swasta				46	48	50	52	54	13,4	42,5	28,99	28,99	32	29%	89%	58%	56%	59%
10	Rasio KDRT				0,15	0,13	0,90	0,8	0,7	0,12	0,13	0,7	0,4	0,4	125%	100%	129%	200%	175%
11	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur				4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	80%	80%	80%	80%	80%
12	Partisipasi angkatan kerja perempuan				65	67	69	71	73	64,93	68,71	67,49	68,29	65,60	100%	103%	98%	96%	90%
13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
15	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
19	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
20	Laju Pertumbuhan Penduduk				0,60	0,59	0,58	0,57	0,58	0,63	0,59	0,62	11,1	1,62	95%	100%	94%	5%	36%
21	Total Fertility Rate (TFR)				2,36	2,35	2,33	2,31	2,28	2,68	2,62	2,37	2,50	2,20	88%	90%	98%	92%	104%
22	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB				n/a	n/a	90	91	92	n/a	n/a	82,86	82,86	82,86	n/a	n/a	92%	91%	90%
23	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk				n/a	n/a	50	55	60	n/a	n/a	22,86	22,86	22,86	n/a	n/a	46%	42%	38%
24	Ratio Akseptor KB				70	72	74	76	78	88,00	57	66	69	70	126%	79%	89%	91%	90%
25	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49				66	68	69	71	73	61,7	56,67	65,95	67,72	70,44	93%	83%	96%	95%	96%
26	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 (ASFR 15-19)				20,42	20,15	19,78	19,23	18,75	27,51	25,85	23,32	23,45	26,20	74%	78%	85%	82%	72%
27	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)				15,48	15,14	14,67	14,11	13,78	7,11	26,64	21,8	13,08	19,75	218%	57%	67%	108%	70%
28	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				42	44	46	48	50	50,67	29,69	29,41	31,10	37,62	121%	67%	64%	65%	75%
29	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB				78	80	82	84	86	68,17	78,46	82,68	82,75	65,29	87%	98%	101%	99%	76%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
30	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB				65	67	69	71	73	58,07	54,09	50,53	58,49	64,90	89%	81%	73%	82%	89%
31	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansis (BKL) Ber-KB				50	53	56	59	62	23,80	43,60	40,78	49,97	56,86	48%	82%	73%	85%	92%
32	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa				600	600	600	600	600	289	556	556	556	556	48%	93%	93%	93%	93%
33	Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pengendalian penduduk				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
34	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan				300	300	300	300	300	300	239	234	300	300	100%	80%	78%	100%	100%
35	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
36	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga				100	100	100	100	100	56	58	60	63	65	56%	58%	60%	63%	65%
37	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				70	72	74	76	78	62	47	52	40	46	89%	65%	70%	53%	59%

Berdasarkan table 2.1 diatas, terlihat bahwa masih banyaknya pelayanan pada urusan sosial yang memiliki kesenjangan antara target dan capaian, namun ada juga yang sudah mencapai target 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan pada urusan sosial adalah sebagai berikut :

- a) Masih sedikit Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berperan aktif dalam penanganan PPKS di daerah;
- b) Masih kurangnya pemberdayaan PSKS;
- c) Belum maksimalnya pendataan terhadap penyandang Disabilitas dan lansia terlantar sehingga menyebabkan belum maksimalnya dalam pemberian bantuan;
- d) Masih belum maksimalnya pengelolaan data fakir miskin sehingga menyebabkan terkendalanya pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat;
- e) Masih minimnya SDM profesional dalam penanganan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- f) Minimnya fasilitas berupa sarana prasarana rehabilitasi sosial.

Adapun faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a) Belum Optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan pada bidang politik, ekonomi dan sosial;
- b) Belum optimalnya identifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a) Belum adanya kebijakan dari daerah yang mengatur tentang pengendalian terhadap kuantitas dan kualitas penduduk;
- b) Belum optimalnya pembinaan terhadap ketahanan keluarga dalam membangun kualitas keluarga yang sejahtera;
- c) Rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB;
- d) Tingginya PUS yang harusnya berKB namun tidak berKB (*unmet need*).

Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan beberapa layanan baik pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah adanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga capaian pada layanan yang di berikan sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsos PPPA P2KB Kabupaten Meranti**  
**(Renstra Periode yang Lalu)**

No.	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.360.605.750	1.521.385.188	1.920.011.350	1.390.166.880		1.280.785.054	1.478.632.910	1.903.282.696	1.286.758.720		94%	97%	99%	93%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.376.000	356.200.000	233.215.000	67.280.000		134.001.000	350.040.500	231.451.145	58.007.000		93%	98%	99%	86%	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.000.000					99.952.856					100%			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90.779.241	57.445.000	9.480.000			84.836.200	52.235.000	9.480.000			93%	91%	100%	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.922.422.017					3.765.694.814					96%
6	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	37.638.927	990.624.700	1.960.828.700	12.771.254.007		37.537.600	988.079.700	1.861.850.700	8.338.220.635		100%	100%	95%	65%	
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial	234.471.100	239.278.100	276.053.200	111.873.000	26.600.300	223.053.000	235.089.700	193.038.000	94.220.000	24.338.300	95%	98%	70%	84%	91%
8	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.174.192.374	400.358.573	669.090.500	102.550.000	9.147.050	1.153.095.324	398.932.573	663.140.500	102.450.000	9.147.050	98%	100%	99%	100%	100%
9	Program Rehabilitasi Korban Bencana		47.095.000	136.000.000	14.257.000	99.998.700		44.740.000	54.302.000	6.257.000	65.544.700		95%	40%	44%	66%
10	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga		462.799.761	603.521.000	438.940.000	345.171.650		458.447.700	550.947.450	426.790.000	169.913.390		99%	91%	97%	49%
11	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial			152.289.000					152.289.000					100%		
12	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					9.068.800					9.068.800					100%
13	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	330.217.000	219.852.000	248.169.400	145.698.213		303.530.082	201.023.805	241.573.900	135.696.500		92%	91%	97%	93%	
14	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	248.143.000	259.020.000	400.678.750	57.798.540		225.580.900	255.954.000	376.393.500	53.073.100		91%	99%	94%	92%	
15	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					159.465.250					156.119.250					98%
16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					1.959.983.505					1.602.476.650					82%
17	Program Perlindungan Perempuan					52.880.000					52.880.000					100%
18	Program pemenuhan Hak Anak (PHA)					85.106.800					83.825.492					98%
19	Program Perlindungan Khusus Anak					571.718.300					247.941.800					43%
20	Program Keluarga Berencana	1.639.300.000	2.656.650.868	3.966.394.400	3.637.812.000	2.874.269.055	1.435.690.000	2.605.024.468	3.087.849.900	2.415.876.567	1.565.694.549	88%	98%	78%	66%	54%
21	Program kesehatan Reproduksi Remaja	72.815.000	37.415.000	55.600.000	41.100.000		72.620.000	37.415.000	55.600.000	41.100.000		100%	100%	100%	100%	
22	Program pelayanan Kontrasepsi	132.100.000	314.290.000	40.000.000	16.500.000		124.967.000	283.022.744	39.996.000	16.500.000		95%	90%	100%	100%	
23	Program Pengendalian Penduduk		820.530.000	38.750.000		495.000.000		768.762.615	-		493.690.500		94%	0%		100%
24	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)					1.032.000.000					715.606.020					69%

Berdasarkan table 2.2 diatas, dapat di lihat realisasi pendanaan Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk Kabupaten kepulauan Meranti. Program tersebut merupakan Program yang mengacu pada Indikator Kinerja sebagaimana yang telah dijabarkan pada tabel 3.1 sebelumnya.

Apabila di Lihat dari segi Pertumbuhan anggaran, terlihat bahwasanya Rata-rata pertumbuhan Anggaran mengalami Naik Turun dari tahun ketahunnya. Adapun pertumbuhan anggaran paling Tinggi yaitu terjadi pada tahun 2020 dimana anggaran di gunakan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan bila ditinjau dari Aspek Penyerapan Anggaran, terlihat bahwa rata-rata penyerapan anggaran dari tahun ke tahunnya berada diatas angka 85 % dan hanya beberapa Program saja yang penyerapan anggarannya di bawah 85 %.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Meranti pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PPKS masih tinggi namun penanganannya belum maksimal;
- b. Belum maksimalnya penerapan SPM bidang Sosial;
- c. Peran serta PSKS dan dunia usaha dalam penanganan PPKS;
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- f. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- g. Munculnya berbagai pengaruh dari media sosial sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perempuan dan anak dalam mengendalikan kualitas kehidupan;
- h. Perkembangan IT yang sangat cepat menuntut penyediaan data berbasis IT yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkoneksi dengan pemerintah Provinsi Riau;
- i. Adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak;
- j. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program KB;
- k. Adanya anggapan bahwa perempuan yang harus mengikuti program KB sementara laki - laki tidak perlu ber KB;
- l. Penguatan kapasitas SDM PKB dan PLKB dalam memberikan penyuluhan KB kepada masyarakat;
- m. Masih kurangnya Tribina, IMP, dan PIK-R yang tebetuk;

#### 2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Meranti pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Sila Kelima Pancasila yang mengamanatkan tentang Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. UU 23 tahun 2014 mengamanatkan tentang pembagian urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga memudahkan penanganan PMKS yang menjadi target nasional maupun target pemerintah daerah dalam pembangunan;
- c. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan terhadap PMKS dan PSKS serta kesetaraan gender dan program KB di daerah.
- d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PPPA PPKB KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Kualitas Manajemen Kinerja Pada Perangkat Daerah	Belum Maksimalnya Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja Pengukuran kinerja yang belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi untuk mempermudah pimpinan atau Stakeholder dalam memantau progress capaian kinerja pemda maupun Perangkat Daerah Kualitas Dokumen Pelaporan yang masih belum sesuai Standar Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP yang mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah
2.	Belum Optimalnya Upaya yang dilakukan dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Belum Optimalnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Masih Rendahnya Cakupan Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) Masih Rendahnya Cakupan PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial yang di berikan kepada masyarakat Miski masih ada yang belum tepat sasaran

			Belum Optimalnya Penanganan terhadap Korban Bencana
			Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan terhadap PPKS belum maksimal
		Pertumbuhan Penduduk yang belum seimbang dan berkualitas	Belum adanya Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan
			Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang di laksanakan belum berjalan Optimal
			Belum Optimalnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera
3.	Belum Setaranya Hak dan Kesempatan antara Laki-laki dan Perempuan dalam setiap Aspek Kehidupan	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan yang di laksanakan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Masih Rendah
			Belum Optimalnya Perlindungan yang di laksanakan terhadap Perempuan
			Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas keluarga
4.	Belum Maksimalnya upaya yang di lakukan dalam menjamin Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Belum Optimalnya Pemenuhan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak yang di berikan	Masih Sedikitnya Lembaga yang bergerak dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak-hak Anak
			Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti belum Optimal
			Layanan Perlindungan Khusus Terhadap Anak yang di laksanakan belum berjalan secara Optimal

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026.**

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah *Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia*.

Unsur visi tersebut adalah *Maju, Cerdas* serta *Bermartabat*. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPPAPKB adalah unsur Bermartabat.

Meranti bermartabat ketika meranti tidak lagi terisolir wilayahnya, tingginya tingkat pengangguran, sempitnya lapangan kerja, tingginya tingkat kemiskinan, rendah kualitas dan daya saing sumber daya manusianya. Dengan pembangunan meranti maju dan cerdas maka akan melahirkan meranti yang bermartabat yaitu meranti yang cerdas terbilang dan gemilang yang diperhitungkan dalam kemajuannya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan **6 (enam) Misi** sebagai berikut:

#### **1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur**

Pemerataan Pembangunan Infrastruktur adalah suatu kondisi penyediaan infrastruktur yang merata terutama infrastruktur dasar seperti tersambungya jalan antar desa ke kecamatan dan jalan kecamatan ke jalan kabupaten, tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan, tersedianya air bersih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman dan Bertakwa Yang Memiliki Daya Saing**

Kuantitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah suatu upaya untuk meningkatkan Manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan daya saing serta memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Daya saing sendiri merupakan kemampuan untuk menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat yang direfleksikan pada adanya upaya yang kuat untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan daya beli.

#### **3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Kesehatan Masyarakat**

Mutu dan Kualitas Kesehatan Masyarakat adalah suatu upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan melengkapi sarana dan prasarana Kesehatan di Kecamatan serta menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten

Kepulauan Meranti menjadi Rumah Sakit Rujukan dengan meningkatkan tipe RSUD menjadi tipe B.

#### **4. Menciptakan Produktivitas Ekonomi Masyarakat**

Produktifitas ekonomi masyarakat adalah suatu upaya menciptakan iklim usaha kreatif, inovatif dan produktif, menciptakan sistem pertanian yang unggul dan modern, menciptakan swasembada sapi dengan memberikan pelatihan, pembinaan dan permodalan bagi UMKM, petani, peternak dan nelayan.

#### **5. Membangun Harmonisasi Sosial- Budaya Masyarakat**

Harmonisasi sosial budaya adalah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan saling bertoleransi dengan tidak adanya konflik antar umat beragama maupun antar suku sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap keanekaragaman suku, adat istiadat dan budaya.

#### **6. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta memberikan layanan prima**

Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta memberikan layanan prima adalah kondisi dimana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien diantaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya percepatan dan ketepatan pemeberian pelayanan kepada masyarakat diantaranya dengan menciptakan pelayanan “*smart city*” dengan konsep pelayanan 1 hari selesai.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial PPPA PPKB Kabupaten Meranti mendukung pencapaian misi 2, 4 dan 6 yaitu :

1. Misi Ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman dan Bertakwa Yang Memiliki Daya Saing.
2. Misi Ke 4 yaitu Menciptakan produktivitas ekonomi masyarakat.
3. Misi Ke 6 yaitu Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yag baik, bersih dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinsos PPPAPPKB adalah sebagai berikut:

##### **1. Misi 2**

- a. Tujuan** : Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya manusia yang Berkualitas.
- b. Sasaran** : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

## 2. Misi 4

- a. **Tujuan** : Menurunkan Tingkat Kemiskinan.
- b. **Sasaran** :Meningkatnya penanganan terhadap pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial.

## 3. Misi 6

- a. **Tujuan** : Mewujudkan reformasi birokrasi
- b. **Sasaran** :Meningkatnya kualitas Manajemen Pemerintah, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2  
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2021-2026

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi Ke 2-3 : <b>Meningkatkan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman dan Bertakwa yang Memiliki daya Saing,</b></p> <p>Tujuan : <b>Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b></p> <p>Sasaran : <b>Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b></p>	<p>1. Minimnya dukungan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.</p> <p>a. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran responsife Gender Belum Optimal</p> <p>b. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p> <p>2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>1. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</p>
2	<p>Misi Ke 4 : <b>Menciptakan Produktivitas Ekonomi Masyarakat</b></p>	<p>1. Kompetensi SDM masih belum optimal</p> <p>2. Belum tersedianya data yang akurat</p>	<p>1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah</p> <p>2. Koordinasi yang baik antar Unit Organisasi</p>

	<p>Tujuan: <b>Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan</b></p>	<p>3. Dukungan dana operasional belum optimal 4. Rendahnya peran serta sektor swasta dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Miskin dan PMKS lainnya.</p>	<p>3. Kemudahan akses informasi Kesejahteraan social 4. Semakin baiknya Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terhadap kejadian tanggap darurat bencana.</p>
	<p>Sasaran: <b>Meningkatnya Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial</b></p>		
3	<p>Misi Ke 6 : <b>Menciptakan Tata Kelola, Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bertanggung Jawab Serta Memberikan Pelayanan Prima</b></p>	<p>1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Dan Informasi Publik. 2. Kurang Memadainya Sarana Dan Prasarana Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah. 3. Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Akuntabilitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah sesuai peraturan. 4. Masih rendahnya nilai Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.</p>	<p>1. Adanya komitmen Kepala Daerah. 2. Semakin membaiknya para digma ASN dalam pelayanan Publik. 3. Semakin mudahnya akses informasi kepada masyarakat. 4. Semakin membaiknya keterbukaan laporan keuangan.</p>
	<p>Tujuan : <b>Mewujudkan Reformasi Birokasi</b></p>		
	<p>Sasaran : • <b>Meningkatnya kualitas Manajemen Pemerintah</b></p>		

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi Riau

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

##### A. Tujuan

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2020-2024 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatkan Layanan yang berkualitas Oleh Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan yang Profesional.
3. Mewujudkan Penguatan tata Kelola serta meningkatkan Efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

## B. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan, melalui indikator :
  - a. Indeks Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Kualitas pemberi layanan kesejahteraan Sosial, melalui indikator:
  - a. Indeks Partisipasi Sosial;
  - b. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non-ASN);
  - c. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi;
  - d. Persentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatnya Kualitas data terpadu Kesejahteraan Sosial, melalui Indikator :
  - a. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3  
Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra kementerian Sosial

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah penduduk miskin yang banyak</li><li>2. Terbatasnya kuota bantuan dari program-program pemerintah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen kepala daerah dalam mengentaskan kemiskinan</li><li>2. Hadirnya program-program baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk penanganan PMKS</li></ol>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang masih belum begitu aktif</li> <li>2. Fungsi dan tugas masing-masing SDM masih belum jelas</li> <li>3. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang kurang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah PSKS yang bertambah ( Tagana, Unit Reaksi Cepat, Sakti Peksos, PSM dan TKSK)</li> <li>2. Terdapat beberapa kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas PSKS</li> <li>3. Setiap tahun di anggarakan bantuan untuk Panti-Panti Sosial</li> </ol>
3.	Meningkatnya data terpadu kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data DTKS yang tidak valid dan tumpang tindih.</li> <li>2. Belum memadainya anggaran untuk Verifikasi dan Validasi DTKS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran data DTKS agar bisa mendorong efisiensi penyaluran bantuan social (Bansos) dan bantuan lainnya dari pemerintah ke masyarakat</li> </ol>

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

#### A. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian PPPA 2020-2024 untuk mendukung Upaya Pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak;
3. Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan PP PA;
4. Meningkatnya perlindungan hak Perempuan dari kekerasan termasuk PPPO;
5. Meningkatnya perlindungan Khusus Anak;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian PPPA

## B. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kementerian PPPA 2020-2024 di arahkan untuk mendukung tujuan Kementerian PPPA, sasaran strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui indicator :
  - a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
  - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
  - c. TPAK Perempuan
  - d. Indeks PUG Nasional
2. Meningkatnya kualitas Tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta Perlindungan Khusus Anak, Melalui Indikator :
  - a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
  - b. Proporsi Perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun
  - c. Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat KLA
  - d. Persentase Balita yang mendapat pengasuh tidak layak
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, Melalui Indikator :
  - a. Indeks pembangunan Partisipasi masyarakat
  - b. Indeks Kualitas Keluarga
4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO, melalui Indikator :
  - a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir
  - b. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif
  - c. Persentase pemda yg menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)
5. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus, melalui Indikator:
  - a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)

- b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif
  - c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
  - d. Persentase Pemda melaksanakan layanan sesuai standar
6. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA, melalui Indikator :
- a. Indeks Reformasi Birokrasi
  - b. Opini BPK atas Laporan Keuangan
  - c. Tingkat Maturitas SPIP
  - d. Nilai SAKIP

Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPPA tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4  
Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya motivasi perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk ikut serta dalam berorganisasi</li> <li>• Adanya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat</li> <li>• Rendahnya kemampuan perempuan dalam mengakses kesempatan mengembangkan diri dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya organisasi-organisasi perempuan yang mendukung pemberdayaan perempuan</li> <li>• Adanya pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas perempuan</li> <li>• Adanya usaha-usaha perempuan yang mulai berkembang</li> <li>• Terbukanya peluang Kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai Lembaga non pemerintah dan akademik</li> </ul>
2.	Meningkatnya kualitas Tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya akses untuk tumbuh kembang anak</li> <li>• Kurangnya dokter spesialis anak yang mampu memantau tumbuh kembang anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan dan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya konselor untuk anak di sekolah-sekolah atau ruang public</li> <li>• Kurangnya pusat kreativitas anak untuk pengembangan kreativitas dan karakter anak</li> <li>• Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya 1.000 hari pertama kelahiran</li> <li>• Kurangnya ruangan khusus bagi anak seperti ruang bermain, dan ruang menyusui di area public seperti perkantoran, rumah sakit, dan Pelabuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terbentuknya forum anak kabupaten</li> <li>• Sudah terbentuknya program sekolah ramah anak</li> <li>• Terbentuknya perda kabupaten layak anak</li> <li>• Terbentuknya Gugus Tugas KLA Kabupaten Bersama Dinas terkait</li> </ul>
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak</li> <li>• Kurangnya pemahaman orang tua untuk pengasuhan dan tumbuh kembang anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya jejaring kerja untuk memperkenalkan dan membantu program peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kualitas keluarga</li> </ul>
4.	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makin bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan</li> <li>• Kurangnya pemahaman perempuan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan</li> <li>• Sulitnya mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya usaha pendampingan terhadap perempuan yang mengalami kasus kekerasan</li> <li>• Adanya sosialisasi terhadap undang-undang perlindungan perempuan dan anak</li> <li>• Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			penanganan kasus terkait perempuan dan anak • Tersedianya UPT PPA
5.	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	• Masih banyaknya korban kekerasan anak yang enggan melapor	• Adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait penanganan kasus terhadap korban kekerasan anak. • Adanyan pendampingan secara khusus bagi korban
6.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA	–	–

### 3.3.3 Telaah Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

Renstra BKKBN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang di undangkan tanggal 11 Mei 2020.

Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### A. Tujuan BKKBN

Selama Periode pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024, BKKBN Memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan Keluarga Berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia.
2. Mengendalikan Struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

#### B. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi, dan janji Presiden 2020-2024 dan prioritas pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, Serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan

BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ *unmet need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 pada tahun 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada tahun 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 pada tahun 2024.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2020-2024, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra BKKBN

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran PUS untuk ber KB masih Rendah</li> <li>• Masih ada tanggapan di masyarakat banyak Anak banyak Rezeki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan pemerintah pada program pengendalian penduduk</li> <li>• Kerja sama yang baik dengan fasilitas kesehatan</li> </ul>
2.	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka perkawinan usia muda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Pemerintah daerah dalam</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Modern (mCPR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan tentang ber-KB yang masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan angka Pravalensi Kontrasepsi Modern</li> <li>• Kegiatan penyuluhan di lapangan oleh PLKB/PKB tentang alat Kontrasepsi</li> </ul>
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendidikan pasangan usia Subur</li> <li>• Jumlah Wanita bekerja yang tinggi</li> <li>• Pengetahuan tentang alat Kontrasepsi yang masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Pendidikan (KIE) tentang keluarga berencana</li> </ul>
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Remaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendidikan yang masih rendah</li> <li>• Pengetahuan remaja tentang Kesehatan reproduksi yang masih rendah</li> <li>• Tingkat ekonomi yang rendah</li> </ul>	—
5.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Stunting masih tinggi</li> <li>• Angka usia Perkawinan</li> <li>• Tingkat ekonomi yang rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses informasi, Pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawata, pengasuhan dan perkembangan anak.</li> <li>• Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, Pendidikan konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga</li> <li>• Peningkatan kualitas Lingkungan keluarga</li> </ul>
6.	Meningkatnya Medidan Usia Kawin Pertama Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendidikan yang masih rendah</li> <li>• Pengetahuan remaja tentang Kesehatan reproduksi yang masih rendah</li> <li>• Tingkat ekonomi yang rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pendidikan Kesehatan reproduksi remaja</li> <li>• Penyediaan pelatihan usaha ekonomi kreatif terutama pada daerah pedesaan</li> </ul>

### 3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- Tujuan dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau adalah :
  1. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS di Provinsi Riau, dengan Indikatornya : Jumlah Jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Sasaran Strategis Dinas Sosial yang ingin dicapai adalah:
  1. Peningkatan Pelayanan terhadap PMKS di Provinsi Riau, dengan Indikatornya : Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial ;
  2. Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau, dengan Indikatornya : Jumlah PSKS yang di berdayakan.

Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6  
Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan  
Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan Pelayanan terhadap PMKS di Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya kuota anggaran dari pemerintah daerah untuk program-program penanganan terhadap PMKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Kepala Daerah Untuk Mengentaskan Kemiskinan</li> <li>• Hadirnya Program-program pemerintah baik pusat maupun daerah untuk penanganan Kemiskinan</li> </ul>
2.	Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Dana Operasional yang belum Optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat beberapa Kegiatan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas PSKS</li> </ul>

3.3.5 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPPAPPKB Provinsi Riau yang terkait dengan pelayanan urusan PPPA dan PPKB adalah sebagai berikut:

- Tujuan dari Renstra Dinas PPPAPPKB Riau adalah :
  1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator pengukurnya :
    - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
    - b. Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu
  2. Mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas dengan Indikatornya adalah Total Fertility Rate (TFR).
- Sasaran yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan dari Renstra Dinas PPPAPPKB Riau adalah sebagai berikut :
  1. Meningkatnya Kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang Pembangunan ;
    - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
  2. Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak ;
    - a. Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu.
  3. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi ;
    - a. Contraceptive Prevalence Rate/CPR
  4. Meningkatnya Median Kawin Pertama Perempuan ;
    - a. Nilai Tengah Tahun Kawin pertama Perempuan

Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7  
 Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan  
 Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk  
 dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan di berbagai bidang Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman perempuan tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan</li> <li>• Budaya Patriarki yang masih melekat kuat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai terbukanya peluang Kerjasama Pemerintah Daerah terhadap Lembaga Non Pemerintahan dan Akademik</li> <li>• Berkembangnya usaha-usaha perempuan</li> <li>• Terbukanya akses dan informasi</li> </ul>
2.	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM dan Prasarana dalam pelayanan korban kekerasan anak dan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya UPT PPPA</li> <li>• Adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait penanganan kasus korban kekerasan anak dan perempuan</li> </ul>
3.	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka perkawinan usia muda</li> <li>• Pengetahuan tentang ber KB yang masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi modern</li> <li>• Kegiatan penyuluhan dilapangan oleh PLKB/PKB tentang galat kontrasepsi</li> </ul>
4	Meningkatnya Median kawin Pertama perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendidikan yang masih rendah</li> <li>• Pengetahuan remaja tentang Kesehatan reproduksi yang masih rendah</li> <li>• Tingkat ekonomi yang rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pendidikan Kesehatan reproduksi remaja</li> <li>• Penyediaan pelatihan usaha ekonomi kreatif terutama pada daerah pedesaan</li> </ul>

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas Manajemen Kinerja Pada Perangkat Daerah;
2. Belum Optimalnya Upaya yang di lakukan dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
3. Belum Setaranya Hak dan Kesempatan antara Laki-laki dan Perempuan dalam setiap Aspek Kehidupan;
4. Belum Maksimalnya upaya yang di lakukan dalam menjamin Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA PPKB**

Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun adalah :

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Indikator Tujuan:
  - a. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Tujuan :
  - a. Nilai AKIP Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Tujuan:
  - a. Angka Kemiskinan
4. Meningkatkan Kesetaraan Gender dengan Indikator Tujuan :
  - a. Indeks Pembangunan Gender
5. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan Indikator Tujuan :
  - a. Nilai KLA

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA PPKB**

Sasaran yang akan ditempuh dalam lima tahun adalah :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indikator sasaran:
  - a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator sasaran :
  - a. Nilai AKIP Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS dengan indikator sasaran:
  - a. Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS
3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dengan Indikator sasaran:
  - a. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)
4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan indikator sasaran:
  - a. Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan terpadu
  - b. Persentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah
5. Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak dengan Indikator sasaran:
  - a. Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB  
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		<b>Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	%	N/A	15	20	-	-	-
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	15	18	-	-	-
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	Nilai	72,11	77,85	79,25	81,74	82,96	84,05
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,11	77,85	79,25	81,74	82,96	84,05
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		<b>Angka Kemiskinan</b>	%	25,28	24,61	22,10	19,50	19	18
		Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	77	79	88	91	93	95
		Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15
4.	Meningkatkan Kesetaraan Gender		<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	%	86,30	86,40	86,50	87,50	87,90	88,56
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	%	96	97	100	100	100	100
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	5,06	6,11	7,90	9,70	10,51	11,23

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.	Meningkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak		Nilai KLA	Nilai	N/A	701	707	712	717	722
		Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	%	96	97	100	100	100	100

Dari tabel 4.1 diatas, ada beberapa perubahan tujuan dan sasaran Strategis yang akan di capai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama sisa masa RPJMD kedepannya, yaitu :

1. Tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan sasarannya yaitu Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang indikatornya adalah Nilai Reformasi Birokrai Perangkat Daerah diganti menjadi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan sasarannya yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang indikatornya adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah, adapun hal ini di karenakan adanya perubahan konsep penilaian Reformasi Birokrasi dari RB General menjadi RB Tematik sehingga untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah tidak lagi di laksanakan. Oleh karena itu, maka di perlukan indikator baru yang di gunakan untuk mengukur kualitas Manajemen Kinerja pada Perangkat Daerah.
2. Adanya penambahan indikator baru terkait “Perlindungan Anak” sesuai dengan rekomendasi yang di berikan oleh tim Evaluator dari Kementerian PANRB berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023. Adapun tujuan baru yang di tambahkan adalah Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang indikatornya yaitu Nilai KLA dengan sasarannya adalah Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak yang indikatornya yaitu Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi dalam wujud strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman dan akan menuntun untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategis membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam Tabel berikut ini :

Tabel 5.1 :  
Analisis SWOT berdasarkan isu – isu strategis daerah

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan ( <i>strenght</i> )	Peluang ( <i>oppornity</i> )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Komitmen aparaturnya dalam Menjalankan fungsi OPD</li> <li>2. Makin membaiknya akuntabilitas kinerja aparaturnya</li> <li>3. Terbangunnya koordinasi yang baik di setiap tingkatan unit kerja</li> <li>4. Semakin bertambahnya Peksos Profesional dalam penanganan PMKS</li> <li>5. Sudah terbentuknya Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>6. Tren Peningkatan angka KB Aktif</li> <li>7. Dukungan Teknologi Informasi yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan program NAWACITA</li> <li>2. Masyarakat Ekonomi Asean</li> <li>3. Dukungan kebijakan penanganan PMKS dari pemerintah pusat</li> <li>4. Komitmen Kepala Daerah</li> <li>5. Dukungan program K/L teknis dalam penanganan masalah di daerah</li> <li>6. Partisipasi masyarakat yang semakin membaik</li> <li>7. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun</li> <li>8. Semakin membaiknya keterbukaan informasi di masyarakat</li> </ol>

Kelemahan ( <i>weakness</i> )	Ancaman ( <i>threats</i> )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka PMKS masih tinggi</li> <li>2. Cakupan Penanganan PMKS masih rendah</li> <li>3. rehabilitasi PMKS belum maksimal</li> <li>4. Akses, fasilitas, dan system pelayanan rehabilitasi yang masih rendah</li> <li>5. Akses terbatas dan daerah terisolir</li> <li>6. Belum optimalnya pelayanan publik</li> <li>7. Belum optimalnya system akuntabilitas kinerja aparatur dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah</li> <li>8. Terbatasnya anggaran daerah</li> <li>9. Pembinaan PSKS belum maksimal</li> <li>10. Kualitas dan kuantitas SDM PLKB masih minim</li> <li>11. Minimnya sarana pendukung Lembaga perlindungan perempuan dan Anak</li> <li>12. Belum maksimalnya Sistem Pengelolaan data terpadu di OPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan biaya pembangunan yang besar</li> <li>2. Minimnya dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi</li> <li>3. Produksi dan harga pasar migas menurun</li> <li>4. Belum akuratnya data kemiskinan, dan PMKS,</li> <li>5. Maraknya peredaran NARKOBA</li> <li>6. Rendahnya peran serta sector swasta dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Miskin dan PMKS lainnya.</li> <li>7. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program KB</li> </ol>

Tabel 5.2  
Penentuan Alternatif Strategi

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI																																						
<b>Tujuan I: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>																																									
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai AKIP Perangkat Daerah</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Formulasi/Rumus Perhitungan :</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keterampilan</th> <th>Sub-Komponen 2 Keahlian</th> <th>Sub-Komponen 3 Peningkatan</th> </tr> <tr> <th></th> <th>20%</th> <th>30%</th> <th>50%</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #D9D9D9;">Perencanaan Kinerja</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D9D9D9;">Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D9D9D9;">Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D9D9D9;">Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>15,5</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D9D9D9;">Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keterampilan	Sub-Komponen 2 Keahlian	Sub-Komponen 3 Peningkatan		20%	30%	50%		Perencanaan Kinerja	5	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	15,5	30	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>• Melaksanakan Pengukuran Kinerja Secara Berkala</li> <li>• Peningkatan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>• Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah</li> </ul>
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																					
	Sub-Komponen 1 Keterampilan	Sub-Komponen 2 Keahlian	Sub-Komponen 3 Peningkatan																																						
	20%	30%	50%																																						
Perencanaan Kinerja	5	9	15	30																																					
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																					
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																					
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	15,5	30																																					
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																					
<b>Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>																																									
1.	Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase PPKS yang tertangani</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Formulasi/ Rumus Perhitungan :</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Kelembagaan PSKS</li> <li>• Peningkatan Kualitas SDM PSKS</li> <li>• Pendampingan sarana prasarana PSKS</li> <li>• Pengelolaan TMP</li> </ul>																																						

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
		<p><i>Jumlah PPKS yang Tertangani X 100 %</i>  <i>Jumlah PPKS Yang Ada</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Operasional bagi PSKS</li> <li>• Pemberdayaan Fakir Miskin dan KAT</li> <li>• Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban Kebakaran</li> <li>• Pelayanan Rehabilitas bagi PMKS di Luar Panti</li> <li>• Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga</li> <li>• Pendampingan Program Keluarga Harapan</li> <li>• Pembinaan Anak Terlantar</li> <li>• Pembinaan Penyandang Cacat</li> <li>• Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan dan PMKS Kabupaten</li> </ul>
2.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)</li> </ul> <p><i>Formulasi/Rumus Perhitungan :</i></p> $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{bi}{Pif} \times K$ <p><i>TFR : Angka Kelahiran Total</i>  <i>ASFR<sub>i</sub> : Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</i>  <i>bi = Jumlah kelahiran dar perempuan pada kelompok umur pada tahun tertentu</i>  <i>pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama</i>  <i>i = kelompok umur (i=1 untu kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20 24,....., i=7 untuk kelompok umu 45-49</i>  <i>K = bilangan kontanta biasanya 1000</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Pelayanan KB pria</li> <li>• Penyediaan sarana pendataan KB</li> <li>• Penyediaan Sarana Petugas Lapangan KB</li> <li>• Peningkatan Kualitas Penyuluhan Keluarga Berencana</li> <li>• Peningkatan pelayanan distribusi ALKON</li> <li>• Penyuluhan langsung kepada masyarakat</li> <li>• Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyuluh KB</li> <li>• Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)</li> <li>• Peningkatan Kelembagaan Konseling (PIK-R)</li> <li>• Penyusunan Kebijakan Pengendalian Penduduk</li> </ul>
<b>Tujuan 3 : Meningkatkan Kesetaraan Gender</b>			
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kelembagaan perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)</li> <li>• Peningkatan SDM Lembaga perlindungan perempuan</li> <li>• Pembentukan satgas P2Tp2A</li> </ul>

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
		<p><i>Formulasi/Rumus Perhitungan :</i></p> <p><i>Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu X100 %</i></p> <p><i>Jumlah laporan/ pengaduan yang masuk ke UPT</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumusan Kebijakan Perlindungan Perempuan</li> <li>• Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan</li> <li>• Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Perempuan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah</li> </ul> <p><i>Formulasi/ Rumus Perhitungan :</i></p> <p><i>Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah X 100%</i></p> <p><i>Jumlah Pekerja Perempuan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam rangka pemenuhan hak partisipasi perempuan dalam Lembaga pemerintah</li> <li>• Memperkuat Lembaga/Jejaring PUG untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan PUG</li> <li>• Pembinaan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan</li> <li>• Pelatihan PPRG bagi OPD</li> <li>• Pelatihan Keterampilan Wanita</li> <li>• Pembinaan Organisasi Wanita</li> <li>• Sosialisasi Gender</li> </ul>
<b>Tujuan 4 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak</b>			
1.	<p>Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</li> </ul> <p><i>Formulasi/Rumus Perhitungan :</i></p> <p><i>Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu X100 %</i></p> <p><i>Jumlah laporan/ pengaduan yang masuk ke Unit pelayanan terpadu</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kelembagaan perlindungan anak (P2TP2A)</li> <li>• Peningkatan SDM Lembaga perlindungan Anak</li> <li>• Pembentukan satgas P2Tp2A</li> <li>• Rumusan Kebijakan Perlindungan anak</li> <li>• Penyusunan Kebijakan Perlindungan anak</li> <li>• Pembinaan Forum Anak</li> <li>• Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja</li> <li>• Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Perempuan dan anak</li> <li>• Pembinaan Kreatifitas Anak</li> <li>• Peningkatan Capaian Kabupaten Layak Anak</li> </ul>

Tabel 5.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

<b>VISI</b>	:	<b>MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MAJU, CERDAS, dan BERMARTABAT DI PROVINSI RIAU INDONESIA</b>		
<b>MISI VI</b>	:	<b>Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih dan Bertanggung jawab serta memberikan Layanan Prima</b>		
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
TUJUAN 1				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Peningkatan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

MISI IV		: Menciptakan Produktivitas Perekonomian Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
TUJUAN 2				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
			Peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Peningkatan Penyediaan Layanan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
		Meningkatkan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
		Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin	Peningkatan Layanan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
			Peningkatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatkan Penanganan terhadap Korban Bencana	Peningkatan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		

				Peningkatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Penguatan Kebijakan Pengendalian Penduduk		Peningkatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
					Peningkatan Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana		Peningkatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
					Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
					Peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
					Peningkatan Pemberdayaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

		Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Misi II - III	:	Meningkatkan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya saing	Manusia Beriman dan Bertakwa yang memiliki
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>TUJUAN 3</b>			
Meningkatkan Kesetaraan Gender		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Peningkatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

			<p>Peningkatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
		Meningkatkan Kualitas Keluarga	<p>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
<b>TUJUAN 4</b>			
Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	<p>Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>

		Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	<p>Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
--	--	---------------------------------------	--

## BAB VI PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1  
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial PPPA PPKB  
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																							
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Perentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95%	95%	5.436.000.000	95%	5.517.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
				X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen	29 Dokumen	50.000.000	29 Dokumen	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI	
				X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
				X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
				X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
				X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
				X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22 Laporan	20.000.000	22 Laporan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
				X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	100%	3.371.000.000	100%	3.436.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.300.000.000	30 Orang/bulan	3.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	51.000.000	5 Laporan	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	36 Laporan	20.000.000	36 Laporan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	15.000.000	8 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi ASN	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	0 Orang	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	682.000.000	100%	728.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	2.000.000	1 Paket	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	11 Paket	131.000.000	7 Paket	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	60.000.000	2 Paket	66.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000	20 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	150 Laporan	389.000.000	160 Laporan	410.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA%	100%	443.000.000	100%	438.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	70.000.000	1 Unit	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	70.000.000	1 Unit	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	40.000.000	3 Unit	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10 Unit	20.000.000	3 Unit	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	110.000.000	1 Unit	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	93.000.000	30 Unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	6 Unit	40.000.000	3 Unit	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	542.000.000	3 Kegiatan	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	127.000.000	12 Laporan	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	303.000.000	100%	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	1 Unit	10.000.000	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	30 Unit	38 Unit	33.000.000	39 Unit	34.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	4 Unit	20.000.000	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	150.000.000	1 Unit	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	80 Unit	40.000.000	102 Unit	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	61.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan aparat, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	95%	5.416.000.000	95%	5.498.000.000	95%	5.719.000.000	95%	16.633.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	29 Dokumen	60.000.000	29 Dokumen	60.000.000	29 Dokumen	60.000.000	87 Dokumen	180.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	7.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	7.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	7.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	7.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	22 Laporan	30.000.000	22 Laporan	30.000.000	22 Laporan	30.000.000	66 Laporan	90.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	100%	3.505.000.000	100%	3.616.000.000	100%	3.718.000.000	100%	10.839.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	30 Orang/bulan	3.415.000.000	30 Orang/bulan	3.520.000.000	30 Orang/bulan	3.617.000.000	90 Orang/bulan	10.552.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan (4)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) (5)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (19)	Lokasi (20)
						2022		2023		2024		2025		2026		Target (17)	Rp (18)		
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)				
		X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	5 Laporan	63.000.000	5 Laporan	68.000.000	5 Laporan	71.000.000	15 Laporan	202.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	36 Laporan	27.000.000	36 Laporan	28.000.000	36 Laporan	30.000.000	108 Laporan	85.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	8 Dokumen	15.000.000	8 Dokumen	15.000.000	8 Dokumen	15.000.000	24 Dokumen	45.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi ASN	-	-	-	-	-	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	28.000.000	100%	81.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	6 Paket	6.000.000	6 Paket	7.000.000	6 Paket	8.000.000	18 Paket	21.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	6 Orang	30.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	6 Orang	30.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	746.000.000	100%	754.000.000	100%	768.000.000	100%	2.268.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	14.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	3 Paket	44.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	8 Paket	142.000.000	9 Paket	144.000.000	9 Paket	148.000.000	26 Paket	434.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	3 Paket	15.000.000	7 Paket	35.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	24.000.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	28.000.000	3 Paket	78.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Paket	70.000.000	2 Paket	73.000.000	2 Paket	75.000.000	6 Paket	218.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	21 Dokumen	11.000.000	22 Dokumen	11.000.000	23 Dokumen	12.000.000	66 Dokumen	34.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	3 Paket	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	36 Laporan	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	160 Laporan	410.000.000	160 Laporan	410.000.000	160 Laporan	410.000.000	480 Laporan	1.230.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	100%	255.000.000	100%	297.000.000	100%	330.000.000	100%	882.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	3 Unit	105.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	3 Unit	105.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	9 Unit	90.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	5 Unit	10.000.000	2 Unit	7.000.000	5 Unit	10.000.000	12 Unit	27.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	110.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	170.000.000	3 Unit	390.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	15.000.000	3 Unit	60.000.000	2 Unit	30.000.000	6 Unit	105.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	9 Unit	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	-	-	-	3 Kegiatan	550.000.000	3 Kegiatan	550.000.000	3 Kegiatan	550.000.000	9 Kegiatan	1.650.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	36 Laporan	45.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	135.000.000	12 Laporan	135.000.000	12 Laporan	135.000.000	36 Laporan	405.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	36 Laporan	1.200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	254.000.000	100%	174.000.000	100%	245.000.000	100%	673.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	1 Unit	10.000.000	0 Unit	-	1 Unit	10.000.000	2 Unit	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	39 Unit	34.000.000	39 Unit	34.000.000	39 Unit	35.000.000	117 Unit	103.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	20 Unit	20.000.000	10 Unit	10.000.000	20 Unit	20.000.000	50 Unit	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Unit	150.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000	3 Unit	400.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	80 Unit	40.000.000	60 Unit	30.000.000	60 Unit	30.000.000	200 Unit	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	0 Unit	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI						
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>																			
	Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	75%	76%	167.000.000	78%	168.000.000	80%	168.000.000	82%	169.000.000	84%	170.000.000	84%	842.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil	N/A%	34%	54.000.000	40%	55.000.000	45%	55.000.000	50%	57.000.000	55%	58.000.000	55%	279.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1.06.02.2.01.0001	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A Keluarga	25 Keluarga	21.000.000	25 Keluarga	21.000.000	25 Keluarga	21.000.000	25 Keluarga	23.000.000	25 Keluarga	24.000.000	125 Keluarga	110.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A Keluarga	25 Keluarga	33.000.000	25 Keluarga	34.000.000	125 Keluarga	169.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI						
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten/Kota	Cakupan Potensi Sumber Daya Manusia Masyarakat yang Mendapatkan Kapasitas	N/A %	71%	113.000.000	71%	113.000.000	73%	113.000.000	75%	112.000.000	77%	112.000.000	77%	563.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	100 Orang	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A Orang	9 Orang	53.000.000	9 Orang	53.000.000	9 Orang	53.000.000	9 Orang	52.000.000	9 Orang	52.000.000	45 Orang	263.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	2 Keluarga	10.000.000	2 Keluarga	10.000.000	2 Keluarga	10.000.000	2 Keluarga	10.000.000	2 Keluarga	10.000.000	10 Keluarga	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	1 Lembaga	15.000.000	1 Lembaga	15.000.000	1 Lembaga	15.000.000	1 Lembaga	15.000.000	1 Lembaga	15.000.000	5 Lembaga	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Sertifikat	1 Sertifikat	15.000.000	1 Sertifikat	15.000.000	1 Sertifikat	15.000.000	1 Sertifikat	15.000.000	1 Sertifikat	15.000.000	5 Sertifikat	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
	Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	50 Orang	50 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	101.000.000	20 Orang	101.000.000	20 Orang	102.000.000	180 Orang	504.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal	50 Orang	50 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	101.000.000	20 Orang	101.000.000	20 Orang	102.000.000	180 Orang	504.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1.06.03.2.01.0001	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	101.000.000	20 Orang	101.000.000	20 Orang	102.000.000	180 Orang	504.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang terdapat dan Direhabilitasi	25 Orang	30.178 Orang	150.000.000	30.178 Orang	150.000.000	30.178 Orang	150.000.000	30.178 Orang	150.000.000	30.178 Orang	151.000.000	150.915 Orang	751.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	N/A	14%	75.000.000	26%	75.000.000	37%	75.000.000	52%	75.000.000	69%	76.000.000	69%	376.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	50 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	25 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	10 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	15 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	15 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	15 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	10 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	50 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	80 Orang	5.000.000	80 Orang	5.000.000	80 Orang	5.000.000	80 Orang	5.000.000	80 Orang	5.000.000	400 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	25 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	10 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	21.000.000	50 Orang	101.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	375.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	80 Orang	5.000.000	80 Orang	5.000.000	80 Orang	5.000.000	80 Orang	5.000.000	80 Orang	5.000.000	400 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	50 Orang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	25 Orang	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	50 Orang	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLUALAUAN MERANTI
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	22 Orang	15.000.000	22 Orang	15.000.000	22 Orang	15.000.000	22 Orang	15.000.000	22 Orang	15.000.000	110 Orang	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLUALAUAN MERANTI
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	100 Orang	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLUALAUAN MERANTI
Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	85%	15.971.000.000	85%	15.839.000.000	85%	15.906.000.000	85%	15.973.000.000	85%	16.041.000.000	85%	79.730.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Cakupan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100%	100%	151.000.000	100%	219.000.000	100%	186.000.000	100%	253.000.000	100%	221.000.000	100%	1.030.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	15 Orang	31.000.000	30 Orang	61.000.000	135 Orang	275.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLUALAUAN MERANTI						
		1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	30 Orang	90.000.000	32 Orang	98.000.000	20 Orang	65.000.000	44 Orang	132.000.000	33 Orang	100.000.000	164 Orang	485.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLUALAUAN MERANTI
		1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	15 Orang	30.000.000	30 Orang	60.000.000	135 Orang	270.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLUALAUAN MERANTI						
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah Padan dengan data Kependudukan	85%	87%	15.820.000.000	89%	15.620.000.000	91%	15.720.000.000	92%	15.720.000.000	94%	15.820.000.000	94%	78.700.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	N/A Orang	5.000 Orang	3.000.000.000	5.000 Orang	3.000.000.000	5.000 Orang	3.000.000.000	5.000 Orang	3.000.000.000	5.000 Orang	3.000.000.000	25.000 Orang	15.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLUALAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	15.000 Keluarga	10.000 Keluarga	750.000.000	10.000 Keluarga	750.000.000	10.000 Keluarga	750.000.000	10.000 Keluarga	750.000.000	10.000 Keluarga	750.000.000	85.000 Keluarga	3.750.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	10.000 Keluarga	11.370.000.000	10.000 Keluarga	11.370.000.000	10.000 Keluarga	11.370.000.000	10.000 Keluarga	11.370.000.000	10.000 Keluarga	11.370.000.000	50.000 Keluarga	56.850.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	250 Orang	700.000.000	150 Orang	500.000.000	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	250 Orang	700.000.000	1.050 Orang	3.100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	90%	90%	163.000.000	90%	163.000.000	90%	163.000.000	90%	164.000.000	90%	164.000.000	90%	817.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	83.000.000	100%	83.000.000	100%	83.000.000	100%	84.000.000	100%	84.000.000	100%	417.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punguisian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	45 Orang	33.000.000	45 Orang	33.000.000	45 Orang	33.000.000	45 Orang	34.000.000	45 Orang	34.000.000	250 Orang	167.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punguisian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	150 Orang	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Punguisi	Jumlah Tempat Punguisian Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	5 Unit	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	50 Orang	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	50 Orang	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Masyarakat Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang menyelenggarakan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	80.000.000	180 Orang	400.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang melaksanakan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	1 Kampung	15.000.000	5 Kampung	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLULAUAN MERANTI								
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	65.000.000	180 Orang	325.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLULAUAN MERANTI								
	Meningkatnya Penanganan Terhadap Perlu Pelayan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	101.000.000	1 Unit	101.000.000	1 Unit	102.000.000	6 Unit	504.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	101.000.000	1 Unit	101.000.000	1 Unit	102.000.000	6 Unit	504.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	46.000.000	1 Dokumen	46.000.000	1 Dokumen	47.000.000	5 Dokumen	229.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLULAUAN MERANTI	
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	0 Makam	20 Makam	45.000.000	20 Makam	45.000.000	20 Makam	45.000.000	20 Makam	45.000.000	20 Makam	45.000.000	100 Makam	225.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLULAUAN MERANTI	
		1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	60 Laporan	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPLULAUAN MERANTI	
	Meningkatkan Kesetaraan Gender																			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	30%	30%	157.000.000	30%	158.000.000	40%	158.000.000	40%	189.000.000	50%	159.000.000	50%	821.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	0%	30%	35.000.000	30%	36.000.000	50%	36.000.000	50%	47.000.000	60%	37.000.000	60%	191.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	30.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	30.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	0 Orang	20 Orang	25.000.000	30 Orang	26.000.000	30 Orang	26.000.000	30 Orang	27.000.000	30 Orang	27.000.000	140 Orang	131.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20%	20%	40.000.000	20%	40.000.000	25%	40.000.000	25%	40.000.000	35%	40.000.000	35%	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Organisasi	24 Organisasi	25.000.000	24 Organisasi	25.000.000	24 Organisasi	25.000.000	24 Organisasi	25.000.000	24 Organisasi	25.000.000	144 Organisasi	125.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	82.000.000	100%	82.000.000	100%	82.000.000	100%	102.000.000	100%	82.000.000	100%	430.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	2 Lembaga	5.000.000	2 Lembaga	5.000.000	2 Lembaga	5.000.000	2 Lembaga	14.000.000	2 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	34.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	71.000.000	100 Orang	70.000.000	600 Orang	351.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	7.000.000	5 Dokumen	45.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	50%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	201.000.000	100%	201.000.000	100%	202.000.000	100%	1.004.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	0,01%	0,008%	80.000.000	0,007%	80.000.000	0,006%	81.000.000	0,005%	81.000.000	0,004%	82.000.000	0,004%	404.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Terhadap Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	41.000.000	1 Dokumen	41.000.000	1 Dokumen	42.000.000	6 Dokumen	204.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	40.000.000	30 Perangkat Daerah	40.000.000	36 Perangkat Daerah	40.000.000	36 Perangkat Daerah	40.000.000	36 Perangkat Daerah	40.000.000	168 Perangkat Daerah	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	N/A%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0 Orang	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	50 Orang	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan	20 Layanan	20.000.000	20 Layanan	20.000.000	20 Layanan	20.000.000	20 Layanan	20.000.000	20 Layanan	20.000.000	100 Layanan	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	70.000.000	3 Kegiatan	70.000.000	3 Kegiatan	70.000.000	3 Kegiatan	70.000.000	3 Kegiatan	70.000.000	15 Kegiatan	350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	100 Orang	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.03.2.03.0003	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	0 Orang	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	50 Orang	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	KAB. KEPULAUAN MERANTI
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kualitas hidup	N/A Kelompok Masyarakat	70 Kelompok Masyarakat	100.000.000	70 Kelompok Masyarakat	100.000.000	70 Kelompok Masyarakat	101.000.000	70 Kelompok Masyarakat	101.000.000	70 Kelompok Masyarakat	102.000.000	350 Kelompok Masyarakat	504.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	51.000.000	2 Kegiatan	51.000.000	2 Kegiatan	52.000.000	10 Kegiatan	254.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	37.000.000	5 Dokumen	179.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	10 Kegiatan	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	1 Lembaga	20.000.000	1 Lembaga	20.000.000	1 Lembaga	20.000.000	1 Lembaga	20.000.000	1 Lembaga	20.000.000	5 Lembaga	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000	250 Orang	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
				Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak															
	Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	NA Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	101.000.000	1 Dokumen	101.000.000	1 Dokumen	102.000.000	5 Dokumen	504.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	101.000.000	2 Kegiatan	101.000.000	2 Kegiatan	102.000.000	10 Kegiatan	504.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.000.000	1 Dokumen	51.000.000	1 Dokumen	52.000.000	5 Dokumen	254.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	100 Lembaga	115 Lembaga	125.000.000	115 Lembaga	125.000.000	115 Lembaga	125.000.000	115 Lembaga	125.000.000	115 Lembaga	125.000.000	675 Lembaga	625.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A %	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	125.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	125.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	11 Kegiatan	500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfrenhensif	100%	100%	505.000.000	100%	505.000.000	100%	505.000.000	100%	505.000.000	100%	505.000.000	100%	2.525.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	0,014%	0,008%	55.000.000	0,007%	55.000.000	0,006%	55.000.000	0,005%	55.000.000	0,004%	55.000.000	0,004%	275.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	0 Kegiatan	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	5 Kegiatan	275.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan	100%	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	1.400.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0 Orang	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	250 Orang	500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	50 Layanan	55 Layanan	180.000.000	55 Layanan	180.000.000	55 Layanan	180.000.000	55 Layanan	180.000.000	55 Layanan	180.000.000	325 Layanan	900.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	2 Kegiatan	170.000.000	2 Kegiatan	170.000.000	2 Kegiatan	170.000.000	2 Kegiatan	170.000.000	2 Kegiatan	170.000.000	11 Kegiatan	850.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	0 Kegiatan	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	65.000.000	5 Kegiatan	325.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang	50 Orang	105.000.000	50 Orang	105.000.000	50 Orang	105.000.000	50 Orang	105.000.000	50 Orang	105.000.000	300 Orang	525.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat																			
	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang terusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	N/A%	1%	200.000.000	1%	200.000.000	1%	200.000.000	1%	201.000.000	1%	201.000.000	1%	1.002.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0 Kegiatan	3 Kegiatan	115.000.000	3 Kegiatan	115.000.000	3 Kegiatan	115.000.000	3 Kegiatan	116.000.000	3 Kegiatan	116.000.000	15 Kegiatan	577.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0 Kegiatan	9 Kegiatan	35.000.000	9 Kegiatan	35.000.000	9 Kegiatan	35.000.000	9 Kegiatan	36.000.000	9 Kegiatan	36.000.000	45 Kegiatan	177.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	5 Kegiatan	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000	2 Kegiatan	85.000.000	2 Kegiatan	85.000.000	2 Kegiatan	85.000.000	2 Kegiatan	85.000.000	10 Kegiatan	425.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0 Dokumen	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	45 Dokumen	350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	69%	71%	2.600.000.000	72%	2.700.000.000	73%	2.801.000.000	74%	2.901.000.000	75%	3.002.000.000	75%	14.004.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Kegiatan	6 Kegiatan	710.000.000	6 Kegiatan	710.000.000	6 Kegiatan	760.000.000	6 Kegiatan	760.000.000	6 Kegiatan	760.000.000	31 Kegiatan	3.700.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0 Laporan	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	10 Laporan	400.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan	9 Laporan	260.000.000	9 Laporan	260.000.000	9 Laporan	260.000.000	9 Laporan	260.000.000	9 Laporan	260.000.000	54 Laporan	1.300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0 Laporan	18 Laporan	140.000.000	18 Laporan	140.000.000	18 Laporan	190.000.000	18 Laporan	190.000.000	18 Laporan	190.000.000	90 Laporan	850.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	750.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi	4 Organisasi	30.000.000	4 Organisasi	30.000.000	4 Organisasi	30.000.000	4 Organisasi	30.000.000	4 Organisasi	30.000.000	20 Organisasi	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	660.000.000	100%	710.000.000	100%	710.000.000	100%	710.000.000	100%	710.000.000	100%	3.500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	9 Unit	9 Unit	160.000.000	9 Unit	210.000.000	9 Unit	210.000.000	9 Unit	210.000.000	9 Unit	210.000.000	54 Unit	1.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0 Orang	3.030 Orang	400.000.000	3.030 Orang	400.000.000	3.030 Orang	400.000.000	3.030 Orang	400.000.000	3.030 Orang	400.000.000	15.150 Orang	2.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0 Organisasi	20 Organisasi	100.000.000	20 Organisasi	100.000.000	20 Organisasi	100.000.000	20 Organisasi	100.000.000	20 Organisasi	100.000.000	100 Organisasi	500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	0%	35%	830.000.000	38%	880.000.000	41%	931.000.000	44%	1.031.000.000	47%	1.132.000.000	47%	4.804.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	11 Laporan	20.000.000	15 Laporan	20.000.000	15 Laporan	20.000.000	15 Laporan	20.000.000	15 Laporan	20.000.000	71 Laporan	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0 Orang	500 Orang	200.000.000	500 Orang	200.000.000	500 Orang	200.000.000	500 Orang	200.000.000	500 Orang	200.000.000	2.500 Orang	1.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	6 Unit	300.000.000	8 Unit	401.000.000	28 Unit	1.301.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0 Orang	200 Orang	50.000.000	200 Orang	50.000.000	200 Orang	50.000.000	200 Orang	50.000.000	200 Orang	50.000.000	1.000 Orang	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	15 Laporan	50.000.000	15 Laporan	50.000.000	15 Laporan	50.000.000	15 Laporan	50.000.000	15 Laporan	50.000.000	75 Laporan	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0 Orang	30 Orang	130.000.000	30 Orang	130.000.000	40 Orang	181.000.000	40 Orang	181.000.000	40 Orang	181.000.000	180 Orang	803.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	11 Laporan	11 Laporan	150.000.000	11 Laporan	150.000.000	11 Laporan	150.000.000	11 Laporan	150.000.000	11 Laporan	150.000.000	66 Laporan	750.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	0 Orang	10 Orang	30.000.000	25 Orang	80.000.000	110 Orang	350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI						
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26 Kampung	26 Kampung	400.000.000	26 Kampung	400.000.000	26 Kampung	400.000.000	26 Kampung	400.000.000	26 Kampung	400.000.000	156 Kampung	2.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04	PERSentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	60%	70%	2.040.000.000	73%	2.041.000.000	76%	2.042.000.000	79%	2.043.000.000	82%	2.044.000.000	82%	10.210.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
				2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	N/A%	31%	1.850.000.000	80%	1.851.000.000	87%	1.852.000.000	92%	1.853.000.000	100%	1.854.000.000	100%	9.260.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	81.000.000	1 Laporan	82.000.000	1 Laporan	83.000.000	1 Laporan	84.000.000	5 Laporan	410.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
				2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	5 Laporan	400.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI						
				2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	30 Unit	25 Unit	400.000.000	25 Unit	400.000.000	155 Unit	2.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI						
				2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0 Orang	400 Orang	200.000.000	400 Orang	200.000.000	2.000 Orang	1.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI						
				2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0 Laporan	9 Laporan	100.000.000	9 Laporan	100.000.000	45 Laporan	500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI						
				2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2100 Orang	741 Orang	900.000.000	741 Orang	900.000.000	5.805 Orang	4.500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI						
				2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	0 Kelompok	6 Kelompok	90.000.000	6 Kelompok	90.000.000	30 Kelompok	450.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	N/A%	63%	190.000.000	66%	190.000.000	69%	190.000.000	71%	190.000.000	74%	190.000.000	74%	950.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Organisasi	5 Organisasi	60.000.000	5 Organisasi	60.000.000	5 Organisasi	60.000.000	5 Organisasi	60.000.000	5 Organisasi	60.000.000	25 Organisasi	300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
		2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	5 Laporan	400.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KAB. KEPULAUAN MERANTI
							28.114.000.000		28.166.000.000		28.239.000.000		28.523.000.000		28.891.000.000		141.933.000.000		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel berikut ini.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD	
		Tahun 2021	Satuan	2022	2023	2024	2025		2026
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	Nilai	15	18	-	-	-	-
2.	Nilai AKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	Nilai	-	77,85	79,25	81,74	85,33	85,33
3.	Persentase PPKS yang tertangani	77%	%	79	88	91	93	95	95
4.	Angka Kelahiran Total/TFR	2,20	Angka	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,15
5.	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	96%	%	97	100	100	100	100	100
6.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	5,06%	%	6,11	7,90	9,70	10,51	11,23	11,23
7.	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	96%	%	97	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti , maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.